



## Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi

**Sri Wulandari**

Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

**Elan Eriswanto**

Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jl. R. Syamsyudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec.Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat

\*Corresponding Author: [sriwulandari4789@gmail.com](mailto:sriwulandari4789@gmail.com)

Diterima: September 2023; Direvisi: Oktober 2023; Dipublikasikan: November 2023

**Abstract.** *The Effect of Accountability and Transparency on the Quality of Financial Management is the subject of this research. To collect data, observations and questionnaires with an ordinal Likert scale were used to process research data. This study used an associative method with a quantitative approach. The population in this study were heads, secretaries, treasurers, heads of fields, and group positions in the Regional Development Planning, Research and Development Agency of Sukabumi Regency. The sampling technique used is nonprobability sampling with saturated sampling technique, namely the entire population is used as a sample, totaling 42 samples. The test results using SPSS 25 For Windows, partially show that accountability has a positive effect on the quality of financial management of 5.698 and a significant of 0.000, transparency has a positive effect on the quality of financial management of 9.451 and a significant of 0.000. The simultaneous test results show that accountability and transparency have a positive effect on the quality of financial management of 43.587 and a significant value of 0.000.*

**Keywords:** Accountability, Transparency, Quality of Financial Management

**Abstrak.** Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan merupakan subjek penelitian ini. Untuk mengumpulkan data, observasi dan kuesioner dengan skala ordinal likert yang digunakan untuk mengolah data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala, sekretaris, bendahara, kepala bidang, dan kelompok jabatan yang berada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling jenuh* yaitu seluruh populasi dijadikan sampel yaitu berjumlah 42 sampel. Hasil pengujian menggunakan SPSS 25 For Windows, secara persial menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan sebesar 5,698 dan signifikan yaitu 0,000, transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan sebesar 9,451 dan signifikan 0,000. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan sebesar 43,587 dan signifikan yaitu 0,000.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Pengelolaan keuangan

## PENDAHULUAN

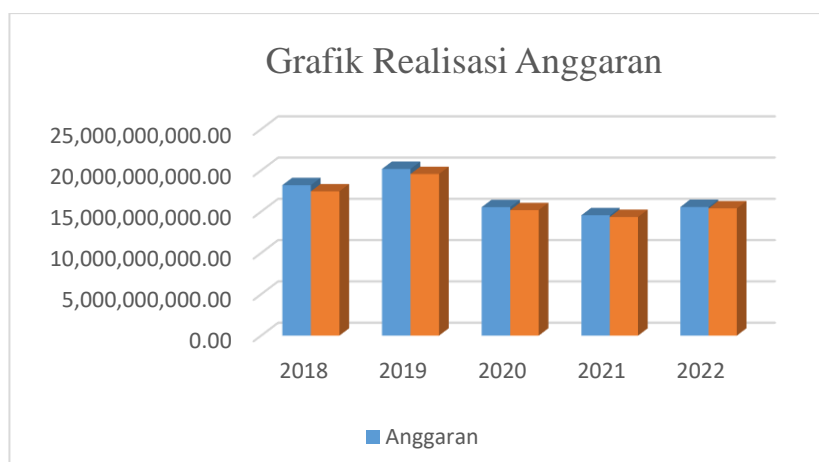
Pengelolaan keuangan adalah bagian dari kegiatan manajemen pribadi yang merupakan proses seseorang atau individu untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan mengelola sumber keuangan secara tersusun tersusun dan sistematis (Putri and Lestari 2019).(Maryawan, 2021) Kinerja keuangan pemerintah daerah tergantung pada seberapa efektif dan efisien pengelolaan sektor keuangan publik. Dengan kata lain, jika pengelolaan sektor keuangan publik dilakukan dengan baik, kinerja keuangan akan lebih baik. Semua tindakan yang diambil oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Menurut (Rusdiana dan Nasihudin,2018), Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.(Hasil, 2020).

Menurut (Mardiasmo,2018) mengemukakan akuntabilitas yaitu keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan proses kekayaan daerah. Akuntabilitas publik berarti bahwa seorang pemilik amanah (agent) bertanggung jawab untuk memberikan tanggung jawab, mendorong, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang bertanggung jawab kepada orang yang memberi amanah (peserta).(Dewi, Sastri dan Sanjaya, 2021). Menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban berupa penjelasan dan jawaban kepada individu, organisasi dan pimpinan atas segala perilaku kinerja yang dipaksakan oleh pimpinan pada pihak yang berhak dan berkuasa menuntut pertanggungjawaban teknik dan administratif. Dalam pandangan beberapa ahli, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa dan kota harus memahami ruang lingkup pertanggungjawabannya masing-masing sesuai tugas pokok yang diembannya, karena pertanggungjawaban yang dituntut meliputi berhasil tidaknya pelaksanaan departement terkait.

Menurut (Toni dan Nur,2019) berpendapat bahwa tujuan transparansi adalah memberikan informasi yang cukup dan terbuka kepada publik untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, di sisi lain, juga dimaksudkan sebagai alat untuk mengontrol semua kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.(Dewi, Sastri dan Sanjaya, 2021). Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menilai apakah suatu pemerintahan berhasil menjalankan kegiatan proses pemerintahan sehingga dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang baik, namun publik seringkali dilihat sebagai sarang inefisiensi, pemborosan dan sumber kebocoran.

Transparansi dan akuntabilitas penting untuk di implementasikan dalam perencanaan maupun realisasinya. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dituntut agar setiap aktivitas yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi serta memperhatikan efisiensi ekonomi serta hasil output yang dihasilkan dari segala aktivitas haruslah benar-benar efektif pelaksanaannya. Kinerja sektor publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan transparansi. Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang maksimal Transparansi dan Akuntabilitas haruslah memkasimalkan implementasinya.

**Gambar 1. Grafik Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2022**



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntabilitas

Salah satu prinsip penting untuk meningkatkan tata kelola, khususnya di sektor publik, adalah akuntabilitas. Ini dilakukan agar hak publik seperti masalah dapat dipenuhi dan agar semuanya transparan. Menurut para ahli, akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut (Adisasmita,2018:31), menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan tindakan dan kinerja seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang berhak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Riswantini, 2018)

Menurut (Adisasmita,2018:34) Di instansi pemerintah, akuntabilitas harus dilakukan dengan cara berikut:

- Pimpinan dan seluruh staf harus berkomitmen untuk mengelola pelaksanaan misi secara akuntabel.

- b. Sistem harus memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berfokus pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan keuntungan yang diperoleh;
- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif untuk mendorong perubahan dalam manajemen lembaga pemerintah melalui pemuktahiran metode pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. (Riswanti, Akuntabilitas, 2018)

## **Transparansi**

Untuk membuat tata kelola yang lebih baik, terutama di sektor publik, transparansi menjadi salah satu prinsip penting selain akuntabilitas. Banyak ahli mendefinisikan transparansi.

Menurut (Arifin Tahir, 2019) mengemukakan bahwa “transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi”. (Riswanto, 2019).

Menurut (Arifin Tahir, 2019) prinsip transparansi memiliki dua aspek diantaranya:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah
2. Hak masyarakat terhadap akses internal

Kedua prinsip tersebut akan sangat sulit dilakukan apabila pemerintah tidak dengan baik menangani kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. (Riswanto, Prinsip transparansi, 2019)

## **Pengelolaan keuangan**

Peraturan menteri ini mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk kekuasaan pengelolaan, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan, dan pelaksanaan APBD bagi daerah yang tidak memiliki DPRD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan, akuntansi keuangan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan, kerugian, dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut (Yusanti, 2020) pengelolaan keuangan adalah kegiatan pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan supaya memperoleh kesejahteraan keuangan.

*Menurut (Soleh dan Rohcmansjah, 2010:10), prinsip-prinsip manajemen Sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengatur kebijakan keuangan daerah meliputi:*

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas menuntut pengambil keputusan untuk bertindak sesuai dengan mandat atau wewenang yang telah diterimanya. Oleh karena itu, komunikasi vertikal dan horizontal kepada publik harus dilakukan, baik dalam proses penyusunan kebijakan, sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan berhasil, maupun hasil dari kebijakan tersebut.

### 2. Value For Money

Keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi tercermin dari peningkatan tingkat pelayanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, peningkatan taraf hidup yang demokratis, berkembangnya keadilan dan keadilan, serta hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan daerah, dan daerah dengan daerah. Keadilan ini hanya dapat dicapai jika pemerintahan daerah diterapkan berdasarkan konsep nilai uang. Dalam konteks otonomi daerah, uang membantu pemerintah daerah menjalankan pemerintahan yang baik. Dalam pengelolaan keuangan daerah dan APBD, pendekatan value for money harus diterapkan. Ini akan mendukung pengelolaan dana publik, atau dana masyarakat, dengan konsep value for money, dan karena itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang kuat. Hal ini dapat dicapai jika pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang kuat.

### 3. Pengelolaan keuangan publik yang jujur (integritas)

Untuk mengurangi kemungkinan korupsi, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan oleh pegawai yang bermoral dan jujur.

### 4. Transparansi

Kebijakan keuangan daerah yang transparan harus diketahui dan dipantau oleh masyarakat dan Komisi Pembangunan dan Reformasi. Pada akhirnya, transparansi dalam pengelolaan keuangan akan menghasilkan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang menghasilkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat.

### 5. Pengendalian

Seringkali, pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dikaji, yaitu membandingkan apa yang direncanakan dengan apa yang telah dicapai. Untuk melakukan ini, analisis varians, atau perbedaan, pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan. Tujuan

dari analisis ini adalah untuk menemukan segera apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, dan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut (Sugiyono,2019) mengemukakan bahwa penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. (Muslimin, 2021) Metode kuantitatif digunakan untuk menentukan hasil dari pemecahan masalah yang akan diteliti. Menurut (Sugiyono,2018) “Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kauntitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. (Fitria, 2016) Pada metode ini diperlukan data yang relevan dengan pertanyaan saat ini dan tujuan penelitian. Pada akhirnya, data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan teori yang telah dipelajari.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan dan menguraikan pengaruh akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap kualitas pengelolaan keuangan (Y). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini akan membahas hasil analisis secara menyeluruh. Selanjutnya, penelitian ini akan menentukan apakah temuan penelitian di lapangan sesuai dengan teori yang digunakan sebagai acuan dan perumusan.

### Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan

Studi ini menyelidiki hubungan antara akuntabilitas (X1) dan kualitas pengelolaan keuangan (Y) secara bertahap, sesuai dengan hipotesis pertama, yaitu akuntabilitas Ho1 memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan secara bertahap, dan akuntabilitas Ha1 memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan secara persial.

**Tabel 1. Hasil Uji t Akuntabilitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	10,850	2,169		5,002	,000
	Akuntabilitas	,680	,119	,669	5,698	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Pengelolaan Keuangan

*Sumber : data diolah penulis menggunakan software SPSS 25 For Windows, 2023*

Dengan nilai 5,698 dan nilai signifikan 0,000, variabel akuntabilitas (X1) memiliki dampak positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan (Y). Hasil penelitian dan pengujian hipotesis uji t dilakukan menggunakan program SPSS 25 for Windows yang telah disebutkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Ho, hipotesis pertama, ditolak, dan Ha, hipotesis kedua, diterima.

Seperti yang dikatakan oleh (Adisasmita, 2018) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini dan teori tersebut menggambarkan bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaannya di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi yang diteliti oleh peneliti dikatakan sudah cukup baik.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan**

Pengaruh Transparansi (X2) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan (Y) dibahas dalam penelitian ini. Ini sejalan dengan hipotesis awal, yaitu Ho2 adalah transparansi yang tidak mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan secara persial dan Ha2 adalah transparansi yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan secara persial.

**Tabel 2. Hasil uji t Transparansi**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,839	1,839		3,175	,003
	Transparansi	1,259	,133	,831	9,451	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Pengelolaan Keuangan

*Sumber : data diolah penulis menggunakan software SPSS 25 For Windows, 2023*

Berdasarkan temuan penelitian dan pengujian hipotesis uji t dengan program Windows SPSS 25 yang telah disebutkan sebelumnya, telah ditunjukkan bahwa variabel transparansi (X2) memiliki dampak positif sebesar 9,451 dan signifikan sebesar 0,000 terhadap kualitas pengelolaan keuangan (Y). Ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, Ho, ditolak, sementara Ha diterima.

Hasil penilaian dan distribusi kuesioner menunjukkan bahwa akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi tergolong cukup baik dalam hal keterbukaan proses. Hal ini diperoleh dari tanggapan responden atas kuesioner, yang mencapai nilai yang cukup baik. Seperti yang dikatakan oleh (Arifin Tahir2019: 49) Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik kepada mereka yang membutuhkannya.

Hasil dan teori menunjukkan bahwa transparansi pelaksanaan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi cukup baik.

### Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan

Hasil penelitian ini melihat bagaimana Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan (Y). Sesuai dengan hipotesis pertama yang diajukan, Ha3 mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan secara bersamaan, sedangkan Ho3 tidak mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan secara bersamaan.

**Tabel 3. Hasil uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220,249	2	110,125	43,587	,000 <sup>b</sup>
	Residual	98,536	39	2,527		
	Total	318,786	41			

a. Dependent Variable: Kualitas Pengelolaan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber : Data diolah penulis menggunakan software SPSS 25 For Windows,2023

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis uji F dengan program SPSS 25 For Windows yang telah dibahas sebelumnya, ditemukan bahwa variabel akuntabilitas (X1) dan variabel transparansi (X2) memberikan pengaruh secara bersamaan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan (Y) sebesar 43,587 dengan signifikansi 0,000. Hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa variabel independen (X1 dan X2) memiliki kemampuan untuk menjelaskan variasi variabel desentralisasi. Sebagian besar, yaitu 30,9%, dipengaruhi oleh faktor lain, yang menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang cukup besar untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Faktor lain juga memengaruhi sebagian besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga, Ho, dan Ha, diterima.



Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga hipotesis yang diajukan diterima.

## **SIMPULAN**

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan secara bersamaan, penulis melakukan penelitian dan diskusi ini pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dengan hasil uji t sebesar 5,698 dan signifikan sebesar 0,000, kualitas pengelolaan keuangan secara persial dipengaruhi secara signifikan oleh akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas telah berjalan dengan baik di lapangan.
2. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan secara persial, dengan hasil uji t 9,451 dan signifikansi 0,000. Transparansi yang diteliti dianggap sangat baik. Hal ini juga sesuai dengan kenyataan bahwa orang dapat dengan mudah mengakses berbagai jenis data.
3. Akuntabilitas dan Transparansi dalam penelitian ini merupakan faktor dalam mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Keuangan, dengan uji F 43,587 dan uji signifikan 0,000.

Oleh karena itu, hipotesis mengatakan bahwa “Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara positif terhadap Kualitas Pengelolaan keuangan”.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil dari analisis pembahasan yang penulis uraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bappelitabngda Kabupaten Sukabumi

Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi diharapkan untuk selalu mempertahankan pengelolaan keuangan yang sudah cukup baik secara akuntabel dan transparan, dan juga untuk selalu meningkatkan prestasi yang diperoleh dalam mengelola keuangan karena laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi. Apabila akuntabilitas instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menambahkan faktor-faktor dan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, karena faktor dan variabel lain tersebut dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, L.P.W., Sastri, I.I.D.A.M. dan Sanjaya, I.K.P.W. (2021) “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangli,” *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), hal. 75–81. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3365.75-81>.
- Fitria (2016) “Fitria. (2013).. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), hal. 1689–1699.
- Hasil, P. (2020) “BAB 2 jasri,” (2017), hal. 5–17.
- Maryawan (2021) “Pengaruh pendapatan, gaya hidup dan pengetahuan keuangan terhadap pengelolaan keuangan,” *Jurnal Keuangan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 15(2), hal. 1–23.
- Muslimin, U. (2021) “Pengaruh Retailing Mix Terhadap Keputusan Pembelian,” *Amsir Management Journal*, 1(2), hal. 81–92. Tersedia pada: <https://doi.org/10.56341/amj.v1i2.22>.